



**PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN**

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025**



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025**



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa sesuai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, telah dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025.**

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2025.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2025 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,



AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

PENUTUP

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sasaran program dan kegiatan Pembangunan di dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 telah diselaraskan dengan sasaran yang tercantum dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024-2026, sehingga turut berkontribusi terhadap capaian sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta perkembangan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman operasional tahunan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai instrumen untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD

Penyusunan Perubahan Renja didasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan.

Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.



KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 dan diarahkan untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, dan pengelolaan pendapatan daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 memuat pendahuluan, visi dan misi, kebijakan untuk mengatasi permasalahan serta program dan kegiatan. Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 merupakan Penajaman dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Sangat disadari bahwa Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan, karena tidak semua aspirasi/usulan yang tidak dapat terakomodir dalam rencana kerja ini, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja di masa mendatang sangat kami harapkan dari semua pihak.

Kebumen, Juni 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen



Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
Pemula Utama Muda
NIP 19740529 199303 1 001

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Ayu Setyaningrum	
Hanitari Mahadewi	

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 4

 A. Latar Belakang 4

 B. Landasan Hukum..... 5

 C. Maksud dan Tujuan 7

 D. Sistematika Penulisan 8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025..... 12

 A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025..... 12

 B. Capaian Kinerja Pelayanan BPKPD Kabupaten Kebumen 26

 C. Capaian Keuangan..... 29

 D. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan
 Keuangan dan Pendapatan Daerah 33

 E. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah..... 36

 F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 46

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 47

 A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 47

 B. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 48

 C. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 50

 D. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan
 Pendapatan Daerah Tahun 2025..... 51

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 55

BAB V PENUTUP..... 121

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	12
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Kebumen	16
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	27
Tabel 2.4	Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	30
Tabel 2.5	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	33
Tabel 2.6	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kebumen	37
Tabel 2.7	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kebumen	46
Tabel 3.1	Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Pelayanan BPKPD Tahun 2021-2026	51
Tabel 4.1	Program Prioritas BPKPD Kabupaten Kebumen yang Mendukung Prioritas Kabupaten	55

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan penajaman dari Renja Perangkat Daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen selanjutnya disingkat Perubahan Renja BPKPD Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKPD, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis BPKPD Tahun 2021-2026. Perubahan Renja BPKPD tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Perumusan rancangan akhir; dan
5. Penetapan.

Penyusunan Perubahan Renja BPKPD Tahun 2025 dilakukan melalui proses teknokratis dan partisipatif dengan mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan, proses *top-down*, dan proses *bottom-up* secara berjenjang berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah dan selanjutnya disinergiskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Perubahan Renja BPKPD Tahun 2025 merupakan:

1. Pedoman bagi BPKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025;

2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi penunjang keuangan.

Menghadapi perkembangan jaman saat ini, Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab yang sangat besar dan dituntut untuk memberi pelayanan yang terbaik, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diamanatkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen menyusun Rencana Kerja Perangkat Perubahan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator tujuan yaitu Nilai SAKIP 74.00 pada Tahun 2025 dan predikat WTP Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Tahun 2025 serta dengan sasaran perangkat daerah yaitu Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah dengan target Indikator Sasaran yaitu Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah pada Tahun 2025 sebesar 15,74% sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis (Renstra) BPKPD Tahun 2021-2026.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja BPKPD tahun 2025 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211)

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219).

C. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja BPKPD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

pada tahun 2025. Sedangkan tujuan dari Perubahan Renja BPKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis BPKPD Tahun 2021-2026;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;
3. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

D. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja BPKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 berdasarkan data LKPJ/LPPD/LKJiP.

B. Analisis Kinerja

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan :

1. Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, dan/atau Indikator Kinerja Kunci (diambil dari IKU Daerah dan IKU OPD);
2. Capaian kinerja urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah (opsional bagi Perangkat Daerah yang memiliki kinerja urusan dengan mengambil data pada Narasi RKPD Tahun 2025)

C. Capaian Kinerja

Memuat perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2024) yang mengacu pada APBD tahun berjalan (tahun 2024). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

D. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti standar pelayanan minimal SDGs;
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayananan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

E. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

Sub-bab ini memuat uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan (Penetapan RKPD)

F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sub-bab ini memuat tentang hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Kabupaten, LSM. asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan, kelurahan dan desa serta pokok-pokok pikiran DPRD yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

B. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Kebumen.

C. Program dan Kegiatan

1. Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program dan kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 Perangkat Daerah selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan, maupun terkait ketersediaan anggaran.

2. Kaidah-kaidah pelaksanaan
3. Rencana Tindak Lanjut.

LAMPIRAN Berisikan dokumen pendukung berupa :

1. Berita Acara Forum Organisasi Perangkat Daerah
2. Notula Forum Organisasi Perangkat Daerah
3. Daftar Hadir Forum Organisasi Perangkat Daerah
4. Foto Kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 diperlukan sebagai dasar penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan BPKPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Tabel 2.1
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	662.674.060.459
1.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	783.205.900
	a. Kordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	151.563.900
	b. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	236.679.000
	c. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	241.014.000
	d. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	112.632.000
	e. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	41.317.000
2.	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	412.065.000
	a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	130.269.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN
	b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	77.659.000
	c.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	64.645.000
	d.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	139.492.000
3.	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		287.848.530
	a.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	59.630.000
	b.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	41.790.350
	c.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	85.500.000
	d.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	91.185.000
	e.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	9.743.180
4.	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		661.190.941.029
	a.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	639.128.616.436
	b.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.102.480.593
	c.	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	16.959.844.000
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			884.293.090
5.	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		884.293.090
	a.	Penyusunan Standar Harga	84.120.000
	b.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	70.033.000
	c.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	79.102.000
	d.	Pengamanan Barang Milik Daerah	357.832.400
	e.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	116.925.690
	f.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	61.290.000
	g.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	63.295.000
	h.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	51.695.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			5.340.829.960
6.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		5.340.829.960
	a.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1.051.882.000
	b.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan	85.209.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN
		Pajak Daerah	
	c.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	113.978.000
	d.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	86.650.360
	e.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	380.759.000
	f.	Penagihan Pajak Daerah	3.622.351.600
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		21.478.330.632
7.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		54.368.000
	a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.758.000
	b.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.610.000
8.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		15.848.947.080
	a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.753.960.000
	b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	94.987.080
9.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		11.200.000
	a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11.200.000
10.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		317.700.000
	a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000
	b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.000.000
	c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.000.000
	d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000
	e.	Penyediaan Bahan/Material	47.200.000
	f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.000.000
11.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		4.235.000.000
	a.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.167.000.000
	b.	Pengadaan Mebel	8.000.000
	c.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000
12.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		525.922.000
	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000
	b.	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	310.000.000
	c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	212.422.000
13.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		485.193.552
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	232.193.552
	b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.000.000
	c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000
JUMLAH			690.377.514.141

Untuk capaian review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKPD Tahun 2025 dan realisasi Renstra BPKPD Tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Kebumen

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	24	12	12	100	12	48	80
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60	24	12	12	100	12	48	80
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60	24	12	12	100	12	48	80
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan peraturan dan perundang-undangan	15	6	3	3	100	3	12	80
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan Penyediaan Bahan/Material	60	24	12	12	100	12	48	80
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600	240	120	120	100	120	480	80
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60	24	12	12	100	12	48	80

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20	8	4	4	100	4	16	80
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pelaksanaan Bimtek/Workshop/S eminar	5	2	1	1	100	0	3	60
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek/Workshop dan Seminar	221	110	55	55	100	55	165	74,66
				Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	40	16	8	8	100	8	32	80
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun. Jumlah orang THL yang terbayar	40	16	8	8	100	8	32	800
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun. Jumlah Rakorpop	20	8	4	4	100	4	16	80
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60	24	12	12	100	12	48	80

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan ASN yang mendapat gaji dan tunjangan. jumlah ASN yang menerima Tamsil	60	24	12	12	100	12	48	60
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	60	24	12	12	100	12	80	60
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	315	271	31	31	100	49	351	111,43
					Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2	303	284	10	10	294	3	297	98.02
					Pengadaan Mebel	Jumlah unit Pengadaan mebeleur	41	20	2	2	100	12	34	82.93
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan mesin lainnya gedung kantor	21	38	19	19	100	34	72	342,86
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana	10	0	0	0	0	0	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
						Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	60	24	12	12	100	12	48	80
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	24	12	12	100	12	48	80
					Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	60	24	12	12	100	12	48	80
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	24	12	12	100	12	48	80
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	577	223	118	118	100	118	459	79,55
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	220	88	44	44	100	44	176	80
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Unit Mebel Terpelihara	242	98	48	48	100	48	194	80,16
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan	301	120	60	60	100	60	240	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
		perbaikan peralatan kerja								
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10	2	2	2	100	2	6	60
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	63	63	63	63	100	63	63	100
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	315	126	63	63	100	63	252	80
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPBMMD	11	5	2	2	100	2	9	81.81
	Penatausahaan Barang Miik Daerah	Jumlah Pelaksanaan kegiatan koordinasi pengembangan aplikasi BMD dan Pendampingan Penatausahaan BMD OPD	11	5	2	2	100	2	9	81.81
	Pengamanan Barang Miik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang difasilitasi pengamanannya (sertifikat.plang.asuransi)	580	312	156	156	100	100	568	97.93
	Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan. Pemindahtangan. Pemusnahan. dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah jenis dokumen penggunaan. pemanfaatan pemindahtanganan. pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	11	5	2	2	100	2	9	81.81
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi Laporan BMD	10	4	2	2	100	2	8	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	10	2	2	2	100	2	6	60
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah	5	2	1	1	100	1	4	80
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersedianya Dokumen penganggaran dan regulasi	50	20	10	10	100	10	40	80
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA APBD dan PPAS Murni dan Perubahan	20	8	4	4	100	4	16	80
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup APBD	10	4	2	2	100	2	8	80
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Perbup Analisis Standar Belanda dan Perbup SHSD/ Standar Satuan Harga	10	4	2	2	100	2	8	60
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Kegiatan Rakor Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	25	10	5	5	100	5	20	80
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	10	4	2	2	100	2	8	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	20	8	4	4	100	4	16	80
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah jenis laporan penerimaan dan pengeluaran dana perimbangan daerah	50	20	10	10	100	10	40	80
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah. Laporan Aliran Kas. dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah OPD yang mengajukan pencairan pembiayaan / Belanja transfer	45	18	9	9	100	9	36	80
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instasi terkait	Jumlah OPD yang melaksanakan laporan rekonsiliasi DTH RTH dan Verifikasi SPM non Gaji	210	104	52	52	100	52	208	99,05
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	10	4	2	2	100	2	8	80
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan daerah dan terlaksananya rakor/pembinaan akuntansi keuangan Daerah	6785	2714	1357	1357	100	1357	5428	80
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban	6775	2710	1355	1355	100	1355	5420	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Semesteran	fungsional OPD jumlah SP2B BLUD. SP2B BOS yang disahkan dan jumlah laporan realisasi APBD Semester I								
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD. BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaann rekon dalm rangka konsolidasi laporan keuangan SKPD. BLUD dengan laporan Keuangan Pemerintah Daerah	15	6	3	3	100	3	12	80
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen LKPD. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10	4	2	2	100	2	8	80
	Pembinaan Akuntansi. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Bimtek Akuntansi	5	2	1	1	100	1	4	80
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keuangan BLUD	5	2	1	1	100	1	4	80
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah paket kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	10	4	2	2	100	2	8	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah nasabah yang mendapatkan subsidi bunga melalui lembaga	5000	1000	0	0	0	0	1000	20
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah desa yang mendapatkan alokasi dana desa (ADD) Jumlah Desa yang mendapat alokasi Dana Desa (DD), BKK, TPQ	2245	898	449	449	100	449	1796	80
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah penyediaan belanja tidak terduga	5	3	1	1	1	1	4	80
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapatkan Alokasi bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) Jumlah Desa yang mendapatkan alokasi bagi hasil retribusi daerah (BHRD)	2245	898	449	449	100	449	1796	80
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	100%	102.59%	100%	102.45%	102.45	100%	100%	100
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Jenis Pengelolaan Pendapatan Daerah	11	11	11	11	100	11	8	100
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Desa/Kelurahanyang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Jumlah OPD yang termonitor dan terevaluasi	460 Desa 47 OPD 37 Unit	460 Desa 47 OPD 37 Unit	460 Desa 47 OPD 37 Unit	460 Desa 47 OPD 37 Unit	100	460 Desa 47 OPD 37 Unit	460 Desa 47 OPD 37 Unit	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
					pengungutan pajak daerah dan retribusi daerah lainnya Jumlah Unit Kerja yang termonitoe dan terevaluasi pengungutan pajak daerah dan retribusi daerahnya								
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah lokasi sasaran yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi keberatan	26 Kec	26 Kec	26 Kec	26 Kec	100	26 Kec	26 Kec	100
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah basis data objek pajak daerah	1.365.632	1.356.791	1.359.505	1.359.505	100	1.361.544	1.361.544	99.70
				Pengolahan. Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah OPD Pengelola Pendapatan	80	80	80	80	100	80	80	100
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Penetapan Wajib Pajak daerah	1.362.938	1.362.938	1.356.823	1.356.823	100	1.358.858	1.358.858	99.70
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang tertagih	1.362.938	1.362.938	1.356.823	1.356.823	100	1.358.858	1.358.858	99.70

Mendasari data yang disajikan pada Tabel 2.2 diatas seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah seluruhnya dapat tercapai dengan optimal, hal tersebut menandakan bahwa seluruh program dan kegiatan BPKPD dapat terlaksana dengan efisien dan efektif guna mendukung pencapaian indikator kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

B. Capaian Kinerja Pelayanan BPKPD Kabupaten Kebumen

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan kali kedelapan dan 8 tahun berturut-berturut Kabupaten Kebumen meraih Opini WTP yaitu Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024.

Dengan penilaian Opini WTP ini maka target IKU Kabupaten Kebumen berdasarkan RPJMD atau RKPD Tahun 2024 telah tercapai. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

NO.	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Indikator Tujuan :											
1	Nilai SAKIP		Nilai SAKIP	67	69	71	74	66.11	66.11*	74	77	Belum Tercapai
2	Opini BPK		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai
	Indikator Sasaran:											
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	14.48%	15.13%	15.40%	15.74%	15.98%	15.98%*	15.74%	15.63%	Tercapai

*=data tahun lalu

Untuk mempertahankan capaian tersebut sampai dengan akhir target RPJMD, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Membangun komitmen semua Aparatur Sipil Negara dan *stakeholder*/pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Mengefektifkan Sistem Penerapan Intern Pemerintah (SPIP) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan;
- c. Perbaiki yang lebih optimal dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- d. Tertib penyampaian laporan keuangan;
- e. Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD); dan
- f. Tertib pengelolaan Pendapatan Daerah.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi atas kualitas laporan keuangan dengan mempertimbangkan Indikator :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
3. Kualitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Selain itu, ada 5 kriteria yang dijadikan dasar penilaian atas kewajaran atas laporan keuangan antara lain, (1) Keterjadian dan Keberadaan, (2) Penilaian, (3) Hak dan Kewajiban, (4) Kelangkaan dan (5) Pengungkapan. Kabupaten Kebumen senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

Target capaian pendapatan asli daerah di Kabupaten Kebumen pada setiap tahunnya senantiasa tercapai, di mana pada tahun 2023 lalu capaian realisasi PAD mencapai Rp463.650.961.705 dari target sebesar Rp432.821.047.000 atau 107,12% dari target, dari total capaian tersebut pendapatan pajak daerah meningkat sebesar Rp7.378.830.180,- atau tumbuh sebesar 5,68% dari tahun sebelumnya.

Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2023. Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan sumberdaya manusia dan bahan baku tidak dimasukkan dalam evaluasi ini. Sedang *output* adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. *Outcome* atau indikator hasil tidak dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat melihat efektifitas kegiatan.

Semangat untuk meningkatkan *local taxing power* di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan sinergi dengan Pemerintah Pusat guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai fungsi penunjang keuangan.

Dalam melaksanakan fungsinya, badan mengacu pada visi Kabupaten Kebumen yaitu Menuju Kabupaten Kebumen yang semakin sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kebumen, diperlukan adanya pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang baik dan benar.

BPKPD Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
- b. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi Badan;
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Badan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

C. Capaian Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun diukur dari realisasi atas anggaran yang telah disepakati dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Realisasi anggaran dan belanja dari 4 program. 13 kegiatan. dan 53 sub kegiatan sebagaimana pada tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
Realisasi Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Triwulan II Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	
				(Rp)	%
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			662.674.060.459	318.652.710.703	48,09
1.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		783.205.900	140.436.150	17,93
	a.	Kordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	151.563.900	72.970.600	48,15
	b.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	236.679.000	16.663.500	7,04
	c.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	241.014.000	27.655.000	11,47
	d.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	112.632.000	15.471.750	13,74
	e.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	41.317.000	7.675.300	18,58
2.	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		412.065.000	168.984.439	41,01
	a.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	130.269.000	55.163.560	42,35
	b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	77.659.000	31.593.279	40,68
	c.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	64.645.000	29.450.000	45,56
	d.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	139.492.000	52.777.600	37,84
3.	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		287.848.530	158.052.933	54,91
	a.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	59.630.000	56.742.000	95,16
	b.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	41.790.350	36.592.233	87,56
	c.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan	85.500.000	62.113.700	72,65

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	
				(Rp)	%
		APBD Kabupaten/Kota			
	d.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	91.185.000	2.605.000	2,86
	e.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	9.743.180	0	0,00
4.	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		661.190.941.029	318.185.237.181	48,13
	a.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	639.128.616.436	318.014.245.098	49,76
	b.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.102.480.593	170.992.083	3,35
	c.	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	16.959.844.000	0	0
5.	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		884.293.090	277.444.608	31,37
	a.	Penyusunan Standar Harga	84.120.000	3.712.500	4,41
	b.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	70.033.000	26.546.533	37,91
	c.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	79.102.000	46.820.600	59,19
	d.	Pengamanan Barang Milik Daerah	357.832.400	119.528.675	33,40
	e.	Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	116.925.690	19.975.400	17,08
	f.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	61.290.000	32.867.500	53,63
	g.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	63.295.000	27.993.400	44,2
	h.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	51.695.000	0	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			5.340.829.960	2.943.502.633	55,11
6.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		5.340.829.960	2.943.502.633	55,11
	a.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1.051.882.000	802.178.710	76,26
	b.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	85.209.000	52.352.700	61,44
	c.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	113.978.000	86.289.075	75,71
	d.	Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	86.650.360	27.904.400	32,20
	e.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	380.759.000	261.294.416	68,62
	f.	Penagihan Pajak Daerah	3.622.351.600	1.713.483.332	47,30
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			21.478.330.632	6.097.682.237	28,39
7.	Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		54.368.000	24.019.276	44,18
	a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.758.000	17.724.776	45,73
	b.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.610.000	6.294.500	40,32
8.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		15.848.947.080	5.245.153.009	33,10
	a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.753.960.000	5.206.068.134	33,05
	b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	94.987.080	39.084.875	41,2
9.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		11.200.000	0	0,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	
				(Rp)	%
	a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11.200.000	0	0,00
10.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		317.700.000	132.928.019	41,84
	a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000	3.930.500	43,7
	b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.000.000	53.221.350	57,2
	c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.000.000	8.353.400	30,9
	d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	1.256.000	35,9
	e.	Penyediaan Bahan/Material	47.200.000	22.553.900	47,8
	f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.000.000	43.612.869	31,6
11.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		4.235.000.000	142.998.860	3,38
	a.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.167.000.000	76.890.000	1,85
	b.	Pengadaan Mebel	8.000.000	7.250.000	90,6
	c.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	58.858.860	98,1
12.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		525.922.000	244.816.442	46,55
	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	1.337.040	38,2
	b.	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	310.000.000	124.605.145	40,2
	c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	212.422.000	118.874.257	56
13.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		485.193.552	307.766.631	63,43
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	232.193.552	101.078.131	43,5
	b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.000.000	18.875.000	35,6
	c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	187.813.500	93,9
JUMLAH			690.377.514.141	327.971.340.181	47,51

Tahun Anggaran 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen mendapatkan anggaran sejumlah Rp690.377.514.141,00 yang terdiri dari belanja operasi sejumlah Rp24.951.573.112,00, belanja modal sejumlah Rp4.235.000.000,00, belanja tidak terduga Rp5.102.480.593,00, dan Belanja transfer Rp656.088.460.436,00 untuk melaksanakan 4 program, 13 kegiatan, dan 53 sub kegiatan (anggaran setelah perubahan).

Realisasi total belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II sebesar Rp327.971.340.181,00 atau 47,51% dari total anggaran Rp690.377.514.141,00. Realisasi belanja operasi sebesar Rp9.643.104.140,00 atau 38,65% dari jumlah anggaran belanja operasi Rp24.951.573.112,00. Realisasi belanja modal sebesar Rp142.998.860,00 atau 3,38% dari jumlah

anggaran belanja modal Rp4.235.000.000,00. Realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp170.992.083,00 atau 3,35% dari jumlah anggaran belanja tidak terduga Rp5.102.480.593,00. Realisasi belanja transfer sebesar Rp318.014.245.098.00 atau 48,47% dari jumlah anggaran belanja transfer sebesar Rp656.088.460.436,00. Secara rinci pagu anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Triwulan II Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1.	BELANJA OPERASI	24.951.573.112	9.643.104.140	38,65
	Belanja Pegawai	15.753.960.000	5.206.068.134	33,05
	Belanja Barang dan Jasa	9.197.613.112	4.437.036.006	48,24
	Belanja Subsidi	0	0	0,00
2.	BELANJA MODAL	4.235.000.000	142.998.860	3,38
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.102.480.593	170.992.083	3,35
4.	BELANJA TRANSFER	656.088.460.436	318.014.245.098	48,47
	Belanja Bagi Hasil	16.959.844.000	0	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	639.128.616.436	318.014.245.098	49,76
	JUMLAH	690.377.514.141	327.971.340.181	47,51

Realisasi belanja operasi hanya mencapai 38,65% karena belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan serta honorarium, terealisasi tidak sesuai yang dianggarkan disebabkan karena terdapat pegawai yang mengalami mutasi, purna tugas, dan meninggal dunia. Selain itu juga terdapat efisiensi pada belanja barang dan jasa. Belanja Modal terealisasi 3,38% dan sisanya merupakan sisa tender. Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar 3,35% karena bersifat penyediaan yang digunakan untuk tanggap darurat bencana dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Sedangkan realisasi belanja transfer mencapai 48,47%.

D. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari berbagai masalah dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen berkaitan dengan hambatan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima (5) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Dewasa ini kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah di Kabupaten Kebumen pada umumnya mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah tersebut meliputi :

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana kegiatan dan yang menangani pengelolaan keuangan cukup memadai;
- b. Koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan;
- c. Adanya komitmen pengelola keuangan sehingga realisasi keuangan kegiatan dapat mencapai target yang telah direncanakan;
- d. Komitmen semua ASN dan *stakeholder*/pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Mengefektifkan Sistem Penerapan Intern Pemerintah (SPIP) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan;
- g. Perbaikan Kinerja Pengelola Keuangan. melalui Program Peningkatan Kapasitas Aparatur. khususnya aparatur pengelola keuangan. maupun melalui upaya perbaikan sistem dan kebijakan akuntansi serta manajemen aset:
 - 1) Mengadakan pelatihan/Bimtek mengenai pengelola keuangan pada SKPD;
 - 2) Menyelenggarakan Bimtek dan Sosialisasi terkait Surat Edaran Penyusunan Laporan Keuangan;
 - 3) Menyelenggarakan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
 - 4) Melakukan sinkronisasi data keuangan setiap bulan dengan OPD terkait; dan
 - 5) Melakukan pendampingan ke tiap OPD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan pendampingan penyusunan laporan aset.
- h. Tertib penyampaian Laporan Keuangan;
- i. Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- j. Menerapkan mekanisme Transaksi Non Tunai (TNT);
- k. Menerapkan pengelolaan keuangan berbasis TI dengan penerapan SIPD-RI dari Penganggaran. Penatausahaan sampai dengan akuntansi pelaporan, e-BMD, Sidat Kedaton, SimGaji, SIPPAS, SIPATMA SP2D Online, Simbankeu, dan SIBUBA;
- l. Mengoptimalkan fungsi PPK SKPD guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan;
- m. Menindaklanjuti segera rekomendasi BPK dengan melibatkan OPD dan berkoordinasi dengan Inspektorat;

- n. Tercapainya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- o. Pelayanan Pajak Daerah berbasis IT melalui E-Tax, E-BPHTB, SIPBB, Sikopat, dan Sidamen; dan
- p. Mudahnya membayar pajak daerah kapan saja dan di mana saja melalui beberapa *channel* pembayaran pajak daerah seperti Bank Jateng (Teller, ATM, *i-Banking*), Tokopedia, Gojek, Indomaret, OVO, LinkAja, Shoppe Pay, Dana; maupun Kantor Pos.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen merupakan perkiraan tantangan dan hambatan yang akan mempengaruhi perjalanan pembangunan pada Tahun 2025. Isu penting disusun berdasarkan hasil evaluasi Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan pada Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen yang sudah dicapai tersebut. masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk dilaksanakan dalam mencapai RPJMD 2021-2026.

Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalani tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain :

1. Terbatasnya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia;
2. Penerapan aplikasi SIPD-RI yang belum sepenuhnya optimal;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi;
4. Perubahan peraturan dan tingkat pusat yang sangat dinamis; dan
5. Terbatasnya perekonomian daerah yang berdampak pada PAD pajak dan retribusi daerah.

Sedangkan terkait dengan peluang dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah antara lain :

1. Adanya dukungan dan komitmen dari kepala daerah maupun pimpinan perangkat daerah
2. Adanya peraturan dan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga cukup memnantu dalam pengelolaan administrasi keuangan, pendapatan dan aset daerah;
4. Kebijakan transaksi non tunai dalam pengelolaan anggaran guna menjamin akuntabilitas administrasi keuangan.

Berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja yang telah diuraikan di depan. maka isu-isu strategis Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah yang masih rendah dalam mendukung kemandirian keuangan daerah;
2. Indeks Kapasitas fiskal daerah yang masih rendah. sehingga mempengaruhi beberapa sektor khususnya infrastruktur;
3. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi daerah;
4. Perlu adanya konsistensi menyeluruh tentang pengelolaan aset yang baik dan benar; dan
5. Masih diperlukannya peningkatan sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah terutama dalam pengaplikasian SIPD-RI.

E. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal serta menjadi pedoman dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah sewajarnya apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara kebutuhan dan keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki. perlu dilakukan seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Adapun review Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Perbandingan Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025 dengan Perubahan RPKD Tahun 2025
Kabupaten Kebumen

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No.	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	27.648.799.935	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	21.520.003.387	
I	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	8 Dokumen	127.887.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	8 Dokumen	54.368.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun .	4 Dokumen	97.887.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun .	4 Dokumen	38.758.000	Penyesuaian Anggaran
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15.610.000	Penyesuaian Anggaran
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	16.553.740.935	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	18.094.326.370	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKPD	Jumlah Orang yang mendapat gaji dan tunjangan ASN	80 Orang/bulan	16.409.436.935	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKPD	Jumlah Orang yang mendapat gaji dan tunjangan ASN	80 Orang/bulan	17.999.339.290	Penyesuaian Anggaran
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	144.304.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	94.987.080.000	Penyesuaian Anggaran
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Paket Pelaksanaan Bimtek/Workshop/ Seminar	-	70.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Paket Pelaksanaan Bimtek/Workshop/ Seminar	-	11.200.000	
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	BPKPD	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	76 Orang	70.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	BPKPD	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	76 Orang	11.200.000	Penyesuaian Anggaran
IV	Administrasi Umum Daerah	BPKPD	Jumlah Bulan Penyediaan	-	351.500.000	Administrasi Umum Daerah	BPKPD	Jumlah Bulan Penyediaan	-	337.700.000	

No.	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah			
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	9.000.000	Penyesuaian Anggaran
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKPD	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	110.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKPD	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	113.000.000	Penyesuaian Anggaran
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKPD	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	30.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKPD	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	27.000.000	Penyesuaian Anggaran
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	BPKPD	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	3.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	BPKPD	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	3.500.000	Sesuai
10	Penyediaan bahan/material	BPKPD	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Material yang disediakan	1 Paket	60.000.000	Penyediaan bahan/material	BPKPD	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Material yang disediakan	1 Paket	47.200.000	Penyesuaian Anggaran
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	138.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	138.000.000	Sesuai
12	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKPD	Jumlah Bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKPD	Jumlah Bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen		
v	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-	9.517.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-	1.706.253.465	Penyesuaian Anggaran
13	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	BPKPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	28 Unit	9.447.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	BPKPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	11 Unit	1.451.253.465	Penyesuaian Anggaran
14	Pengadaan Mebel	BPKPD	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 Unit	10.000.000	Pengadaan Mebel	BPKPD	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	6 Unit	33.000.000	Penyesuaian Anggaran
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	6 Unit	60.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	222.000.000	Penyesuaian Anggaran

No.	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	BPKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	-	515.672.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	BPKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	-	530.962.000	
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.500.000	Penyesuaian Anggaran
17	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	310.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	275.000.000	Penyesuaian Anggaran
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	201.672.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	252.462.000	Penyesuaian Anggaran
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	513.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	785.193.552	
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	260.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	232.193.552	Penyesuaian Anggaran
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit	53.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	57 Unit	53.000.000	Sesuai
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	500.000.000	Penyesuaian Anggaran
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKPD	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	696.541.436.400	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKPD	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	675.916.856.030	
IX	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Anggaran dan Regulasi	-	990.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Anggaran dan Regulasi	-	805.205.900	
22	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKPD	Jumlah Dokumen KUA APBD dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	180.000.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKPD	Jumlah Dokumen KUA APBD dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	151.563.900	Penyesuaian Anggaran

No.	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
23	Koordinasi dan Penyusunan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	300.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	253.952.000	Penyesuaian Anggaran
24	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	150.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	112.632.000	Penyesuaian Anggaran
25	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKPD	Jumlah Kegiatan Rakor Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	60.000.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKPD	Jumlah Kegiatan Rakor Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	41.317.000	Penyesuaian Anggaran
26	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	BPKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	2 Dokumen	300.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	BPKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	2 Dokumen	245.741.000	Penyesuaian Anggaran
X	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan daerah	-	534.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan daerah	-	412.065.000	
27	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	10 Dokumen	174.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	10 Dokumen	130.269.000	Penyesuaian Anggaran
28	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah. Laporan Aliran Kas. dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKPD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	50 Laporan	94.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah. Laporan Aliran Kas. dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKPD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	50 Laporan	77.659.000	Penyesuaian Anggaran

No.	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
			Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
29	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	96.000.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	64.645.000	Penyesuaian Anggaran
30	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	BPKPD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen	170.000.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	BPKPD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen	139.492.000	Penyesuaian Anggaran
XI	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Penyampaian Pelaporan Keuangan SKPD Tepat Waktu	-	497.775.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Penyampaian Pelaporan Keuangan SKPD Tepat Waktu	-	287.848.530	
31	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	BPKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	1355 Laporan	94.685.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	BPKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	1355 Laporan	59.630.000	Penyesuaian Anggaran
32	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	101.090.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	41.790.350	Penyesuaian Anggaran
33	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala	BPKPD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	130.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban	BPKPD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	85.500.000	Penyesuaian Anggaran

No.	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
	Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
34	Pembinaan Akuntansi. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	53 Orang	160.000.000	Pembinaan Akuntansi. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	53 Orang	91.185.000	Penyesuaian Anggaran
36	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	100%	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	37 Lembaga	12.000.000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	100%	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	37 Lembaga	9.743.180	Penyesuaian Anggaran
XII	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD	Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	694.519.061.400	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD	Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	674.411.736.600	
37	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	449 Laporan	675.559.217.400	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKPD	Bantuan Desa Tematik Jumlah Desa yang mendapat Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Jumlah desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (DD), BKK.TPQ, dan PilkaDes -Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	449 Laporan	655.451.892.600	Penyesuaian Anggaran
38	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan	2 Laporan	2.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan	2 Laporan	2.000.000.000	Sesuai

No.	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
			Mendesak					Mendesak			
39	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	449 Desa	16.959.844.000	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	449 Desa	16.959.844.000	Sesuai
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKPD	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	1.122.424.000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKPD	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	884.293.090	
XIII	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	83 Dokumen	1.122.424.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	83 Dokumen	884.293.090	
40	Penyusunan Standar Harga	BPKPD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	85.000.000	Penyusunan Standar Harga	BPKPD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	84.120.000	Penyesuaian Anggaran
41	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	110.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	70.033.000	Penyesuaian Anggaran
42	Penatausahaan Barang Miik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	110.492.000	Penatausahaan Barang Miik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	79.102.000	Penyesuaian Anggaran
43	Pengamanan Barang Miik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	400.000.000	Pengamanan Barang Miik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	357.832.400	Penyesuaian Anggaran
44	Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan. Pemindahtangan. Pemusnahan. dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	150.000.000	Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan. Pemindahtangan. Pemusnahan. dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	116.925.690	Penyesuaian Anggaran

No.	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
45	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	90.000.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	61.290.000	Penyesuaian Anggaran
46	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	125.000.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	63.295.000	Penyesuaian Anggaran
47	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40 orang	51.932.000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40 orang	51.695.000	Penyesuaian Anggaran
D	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKPD	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	-	5.689.515.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKPD	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	-	5.340.829.960	
XIV	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD	Jumlah Jenis Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	5.689.515.000	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD	Jumlah Jenis Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	5.340.829.960	
48	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.		Jumlah desa/kelurahan yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah - Jumlah unit kerja yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahnya	2 Dokumen	1.100.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.		Jumlah desa/kelurahan yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah - Jumlah unit kerja yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahnya	2 Dokumen	1.051.882.000	Penyesuaian Anggaran
49	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah lokasi sasaran yang mendapatkan penyuluhan sosialisasi dan keberatan	26 Laporan	105.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah lokasi sasaran yang mendapatkan penyuluhan sosialisasi dan keberatan	26 Laporan	85.209.000	Penyesuaian Anggaran
50	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah basis data objek pajak daerah	1.363.586 Laporan	120.576.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah basis data objek pajak daerah	1.363.586 Laporan	113.978.000	Penyesuaian Anggaran
51	Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah OPD Pengelola Pendapatan	80 Laporan	120.000.000	Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah OPD Pengelola Pendapatan	80 Laporan	86.650.360	Penyesuaian Anggaran

No.	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
52	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah penetapan wajib pajak daerah	1.360.897 Dokumen	383.939.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah penetapan wajib pajak daerah	1.360.897 Dokumen	380.759.000	Penyesuaian Anggaran
53	Penagihan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah wajib pajak yang tertagih	1.360.897 Dokumen	3.860.000.000	Penagihan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah wajib pajak yang tertagih	1.360.897 Dokumen	3.622.351.600	Penyesuaian Anggaran
JUMLAH TOTAL					731.002.175.335	JUMLAH TOTAL					

F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/Kegiatan pada BPKPD Kabupaten Kebumen selain bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis) juga berasal dari usulan para pemangku kepentingan. dalam hal ini Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD (politis). Rincian usulan kegiatan yang masuk dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kebumen
Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah/Kegiatan Penunjang Urusan/Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Berdasarkan usulan pokok-pokok pikiran DPRD diketahui rekapitulasi untuk usulan dengan tujuan akhir BPKPD yaitu sebagai berikut :

No.	Indikator/Tujuan Sasaran	Jumlah Usulan	Jumlah Desa	Jumlah Kecamatan	Anggaran
1.	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan Desa	15	15	11	Rp 2.490.000.000
2.	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa	137	130	24	Rp 20.607.500.000
3.	Kegiatan Rehabilitasi Lapangan Desa	15	15	11	Rp 1.879.000.000
TOTAL		167	160	46	Rp 24.976.500.000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan RKP Tahun transisi antara RPJPN Tahun 2005-2025 dengan RPJPN Tahun 2025-2045, sekaligus penjabaran awal Rancangan Undang-Undang RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 sebagai tahap pertama pembangunan 5 tahunan. “Visi Indonesia Emas Tahun 2045 sebagai negara nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. RKP Tahun 2025 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, untuk mencapai tujuan pembangunan tahun 2025 ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;
3. Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Prioritas Nasional 4 : Memperkuat Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Prioritas Nasional 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan; dan
8. Prioritas Nasional 8 : Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

Mendasari prioritas pembangunan nasional diatas BPKPD Kabupaten Kebumen mendukung Prioritas Nasional 7 yaitu mendukung Penguatan Fondasi Keuangan Daerah melalui intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, akses pemanfaatan pendanaan alternatif, serta tata kelola dan transparansi keuangan daerah.

Sementara itu Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2025 diarahkan pada tema “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter” yang dijabarkan dalam Prioritas Daerah Tahun 2025. Adapun Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 diarahkan pada :

1. Peningkatan Kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; dan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

B. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025. tema pembangunan tahun 2025 adalah “Peningkatan Sektor Pertanian. Industri. dan Jasa melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia ”. Prioritas pembangunan tahun 2025 antara lain :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. dilakukan melalui upaya:
 - a. Peningkatan tata kelola organisasi dalam rangka mencapai target kinerja pembangunan;
 - b. Penerapan merit sistem dalam rangka peningkatan manajemen sumber daya aparatur pemerintah;
 - c. Optimalisasi pengendalian pembangunan. pengelolaan dan analisis data serta pengembangan riset dan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan;
 - d. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah; serta

- e. Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang andal dan terintegrasi dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif. dilakukan melalui upaya:
 - a. Peningkatan mutu dan layanan kesehatan dan implementasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. Peningkatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan gizi masyarakat serta kesehatan ibu dan anak;
 - c. Peningkatan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam rangka pencapaian SPM Kesehatan;
 - d. Peningkatan akses layanan pendidikan inklusif dan penerapan penjaminan mutu pendidikan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pendidikan;
 - e. Dukungan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Tengah yaitu Wajib Belajar 13 Tahun pada 1 tahun usia pra sekolah serta pendidikan kesetaraan dengan fokus Pusat Kegiatan Belajar Mengajar sebagai ujung tombak penanganan anak tidak sekolah;
 - f. Peningkatan kualitas dan kompetensi guru secara berkelanjutan;
 - g. Penguatan pendidikan agama, karakter dan budi pekerti; serta
 - h. Peningkatan pengarusutamaan *gender* serta perlindungan perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan Kebumen layak anak.
 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. dilakukan melalui upaya:
 - a. pengembangan komoditas unggulan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian;
 - b. peningkatan skala ekonomi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor industri;
 - c. pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor jasa;
 - d. pengembangan keanekaragaman budaya, hayati dan geologi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat
 - e. peningkatan efisiensi perdagangan dalam rangka pengendalian harga;

- f. peningkatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
 - g. peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas pangan serta optimalisasi pemanfaatan lahan pangan lestari dalam rangka penguatan ketahanan pangan;
 - h. peningkatan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan; serta
 - i. peningkatan perlindungan tenaga kerja baik pada sektor formal maupun informal.
4. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. dilakukan melalui upaya:
- a. pengembangan sistem dan jaringan infrastruktur dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi;
 - b. optimalisasi sistem jaringan air bersih perpipaan dalam rangka peningkatan layanan air bersih;
 - c. pengembangan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hunian masyarakat;
 - d. peningkatan Upaya konservasi dalam rangka pelestarian lingkungan; dan
 - e. penataan Ruang Terbuka Hijau dan pengelolaan persampahan serta limbah dalam rangka meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
5. Peningkatan kondusivitas wilayah. kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat. dilakukan melalui upaya:
- a. penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini;
 - b. peningkatan partisipasi masyarakat pada Pilkades serentak tahun 2025 dalam rangka penguatan demokrasi;
 - c. penguatan kapasitas Desa Tangguh Bencana dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan bencana; dan
 - d. pengembangan dan pelestarian budaya daerah

C. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BPKPD Kabupaten Kebumen sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Keuangan sehingga program kegiatan di BPKPD mendukung Misi 1 Bupati Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi. Dengan jalan mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan BPKPD, tujuan dan sasaran rencana kerja BPKPD tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Pelayanan BPKPD Tahun 2021-2026

No	Bidang/Urusan /Indikator	Satuan	Data Awal		Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Indikator Tujuan Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel a. Nilai SAKIP b. Opini BPK (WTP/WDP)	Nilai WTP/WDP	63.85 WTP	64.00 WTP	67.00 WTP	69.00 WTP	71.00 WTP	74.00 WTP	77.00 WTP
	Indikator Sasaran : Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	14.59	12.88	14.88	15.13	15.40	15.74	15.63

D. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Rencana kerja BPKPD Tahun 2025 mencakup 4 program yang terdiri dari 13 kegiatan dan 53 sub kegiatan yang terkait program. dengan uraian sebagai berikut :

- 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**
 - a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran
 - 5) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

b. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah. Laporan Aliran Kas. dan Pelaksanaan Pemutungan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
- 3) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait.
- 4) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.

c. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- 1) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran
- 2) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 4) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- 5) Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

d. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah

- 1) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- 2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- 3) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 1) Penyusunan Standar Harga
- 2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah
- 4) Pengamanan Barang Milik Daerah
- 5) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 6) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- 7) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

- 8) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 1) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- 2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- 3) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- 4) Pengolahan. Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- 5) Penetapan Wajib Pajak Daerah
- 6) Penagihan Pajak Daerah

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Penyediaan Bahan/Material
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan
- 2) Pengadaan Mebel
- 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 2) Pemeliharaan Mebel
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

g. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi. misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah. dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal. maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

A. Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten

Prioritas Pendanaan di BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 memperhatikan Renstra BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 diantaranya adalah :

Tabel 4.1
Program Prioritas BPKPD Kabupaten Kebumen
Yang Mendukung Prioritas Kabupaten

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2025 Perubahan		Prakiraan Maju 2026	
			Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	675.916.856.030	100 %	656.650.000.000
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	63 Dokumen	884.293.090.	63 Dokumen	1.293.000.000
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	100%	5.340.829.960	100%	1.615.000.000
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	21.520.003.387	100%	22.356.000.000
TOTAL				703.661.982.467		731.002.265.335

B. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						703.661.982.467,00						681.979.000.000,00		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						703.661.982.467,00							681.979.000.000,00	
	5	02				KEUANGAN						703.661.982.467,00							681.979.000.000,00	
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	21.520.003.387,00						-	22.421.000.000,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	-			8 Dokumen	54.368.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan	-	-	95.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas				
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	38.758.000,00	Kab. Kebumen . Kebumen . Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan	-		60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																publik yang berkualitas				
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	15.610.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		35.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	17.999.339.290,00	Kab. Kebumen . Kebumen . Kebumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD). DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		16.900.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	94.987.080,00	Kab. Kebumen . Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		240.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				76 Orang	11.200.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		105.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	113.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		115.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Bahan/Mat erial yang Disediakan				1 Paket	47.200.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkat an tata kelola pemerinta han yang lebih adaptif dan kolaborati f 1. Peningkat an tata kelola pemerinta han yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberik an pelayanan publik yang berkualitas	-		70.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN PENDAPAT AN DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	138.000.000,00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		145.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	01	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.706.253.465,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	-	3.577.000.000,00	
	5	02	01	2.0	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				11 Unit	1.451.253.465,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		3.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	33.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkat an tata kelola pemerinta han yang lebih adaptif dan kolaborati f 1. Peningkat an tata kelola pemerinta han yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberik an pelayanan publik yang berkualitas	-		12.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN PENDAPAT AN DAERAH
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	222.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		65.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	530.962.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	-	659.000.000,00		
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Lapora n	3.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkat an tata kelola pemerinta han yang lebih adaptif dan kolaborati f 1. Peningkat an tata kelola pemerinta han yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberik an pelayanan publik yang berkualitas	-		4.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN PENDAPAT AN DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi . Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	275.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		315.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	252.462.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		340.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							0				00	232.193.552,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	500.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		100.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-			-	675.916.856.030,00						-	656.650.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	805.205.900,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	-	1.055.000.000,00	
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	151.563.900,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		190.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	253.952.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		320.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokum en	245.741.000,00	Kab. Kebumen . Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkat an tata kelola pemerinta han yang lebih adaptif dan kolaborati f 1. Peningkat an tata kelola pemerinta han yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberik an pelayanan publik yang berkualitas	-		320.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN PENDAPAT AN DAERAH
	5	02	02	2.0 1	00 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokum en	112.632.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkat an tata kelola pemerinta han yang lebih adaptif dan kolaborati f 1. Peningkat an tata kelola pemerinta han yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberik an pelayanan publik yang berkualitas	-		160.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN PENDAPAT AN DAERAH
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaaan Anggaran Belanja Daerah				2 Dokumen	41.317.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		65.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	02	2.0	2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	412.065.000.00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	-	568.000.000,00	
	5	02	02	2.0	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaa n Kas Daerah				10 Dokum en	130.269.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkat an tata kelola pemerinta han yang lebih adaptif dan kolaborati f 1. Peningkat an tata kelola pemerinta han yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberik an pelayanan publik yang berkualitas	-		180.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN PENDAPAT AN DAERAH
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah. Laporan Aliran Kas. dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah. Laporan Aliran Kas. dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah. Laporan Aliran Kas.				50 Laporan	77.659.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		98.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

[illegible]

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				2 Dokumen	139.492.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		185.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan. Triwulanan dan Semesteran				1355 Laporan	59.630.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		97.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD. BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung gjawaban Pelaksanaa n APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung gjawaban Pelaksanaa n APBD Kabupaten/ Kota				2 Dokum en	85.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkat an tata kelola pemerinta han yang lebih adaptif dan kolaborati f 1. Peningkat an tata kelola pemerinta han yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberik an pelayanan publik yang berkualita s	-		140.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN PENDAPAT AN DAERAH
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota				53 Orang	91.185.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		165.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah BLUD Kabupaten/ Kota yang Dibina				37 Lembaga	9.743.180,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				449 Laporan	655.451.892.600,00	Kab. Kebumen . Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM. DANA DESA	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		635.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaa n Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota				449 Lapora n	16.959.844.000.00	Kab. Kebumen . Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkat an tata kelola pemerinta han yang lebih adaptif dan kolaborati f 1. Peningkat an tata kelola pemerinta han yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberik an pelayanan publik yang berkualita s	-		17.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGA N DAN PENDAPATAN DAERAH
3	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-			-	884.293.090,00						-	1.293.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	357.832.400,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan. Pemindahtanganan. Pemusnahan. dan Penghapusan Barang Milik Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan. Pemindahtanganan. Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	116.925.690,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	61.290.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		95.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	63.295.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		130.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaa n Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota				40 Orang	51.695.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkat an tata kelola pemerinta han yang lebih adaptif dan kolaborati f 1. Peningkat an tata kelola pemerinta han yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberik an pelayanan publik yang berkualita s	-		53.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN PENDAPAT AN DAERAH
4	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	5.340.829.960,00						-	1.615.000.000.00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	1.051.882.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		245.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				26 Laporan	85.209.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		105.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1363586 Laporan	113.978.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan . Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				80 Laporan	86.650.360,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		145.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1360897 Dokumen	380.759.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		450.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1360897 Dokumen	3.622.351.600,00	Kab. Kebumen . Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		420.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
	J U M L A H											703.661.982.467,00								681.979.000.000,00		

BAB V PENUTUP

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sasaran program dan kegiatan Pembangunan di dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 telah diselaraskan dengan sasaran yang tercantum dalam dokumen Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024-2026, sehingga turut berkontribusi terhadap capaian sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta perkembangan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman operasional tahunan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai instrumen untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Penyusunan Perubahan Renja didasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan.

Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Kebumen, Juni 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kebumen



Drs Aden Andri Susilo, M.Si

Pemuda Utama Muda

NIP 19740529 199303 1 001

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KEBUMEN TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH								731.002.175.335,00	688.091.279.480,00	703.661.982.467,00	-27.340.192.868,00						681.979.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							731.002.175.335,00	688.091.279.480,00	703.661.982.467,00	-27.340.192.868,00							681.979.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN							731.002.175.335,00	688.091.279.480,00	703.661.982.467,00	-27.340.192.868,00							681.979.000.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	27.648.799.935,00	21.517.119.080,00	21.520.003.387,00	-5.227.799.935,00							22.421.000.000,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun				8 Dokumen	8 Dokumen	127.887.000,00	58.840.000,00	54.368.000,00	-73.519.000,00			-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		95.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen Dokumen	4 Dokumen	97.887.000,00	38.758.000,00	38.758.000,00	-59.129.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	20.082.000,00	15.610.000,00	-14.390.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			35.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	16.553.740.935,00	15.848.947.080,00	18.094.326.370,00	1.540.585.435,00			-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		17.140.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/b ulan	80 Orang/b ulan	16.409.436.935,00	15.753.960.000,00	17.999.339.290,00	1.589.902.355,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			16.900.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	144.304.000,00	94.987.080,00	94.987.080,00	-49.316.920,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			240.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	70.000.000,00	20.760.000,00	11.200.000,00	-58.800.000,00			-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		105.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				76 Orang	76 Orang	70.000.000,00	20.760.000,00	11.200.000,00	-58.800.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			105.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	351.500.000,00	334.000.000,00	337.700.000,00	-13.800.000,00			-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		390.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	-1.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	110.000.000,00	100.000.000,00	113.000.000,00	3.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			115.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	27.000.000,00	-3.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	52.500.000,00	47.200.000,00	-12.800.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	138.000.000,00	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			145.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	9.517.000.000,00	4.235.000.000,00	1.706.253.465,00	-7.810.746.535,00			-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		3.577.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				28 Unit	11 Unit	9.447.000.000,00	4.167.000.000,00	1.451.253.465,00	-7.995.746.535,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			3.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	6 Unit	10.000.000,00	8.000.000,00	33.000.000,00	23.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			12.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	5 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	222.000.000,00	162.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			65.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	515.672.000,00	529.572.000,00	530.962.000,00	15.290.000,00			-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		659.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			4.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	310.000.000,00	310.000.000,00	275.000.000,00	-35.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			315.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	201.672.000,00	216.072.000,00	252.462.000,00	50.790.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			340.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	513.000.000,00	490.000.000,00	785.193.552,00	272.193.552,00			-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		455.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 0	0 0	260.000.000,00	237.000.000,00	232.193.552,00	-27.806.448,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	57 Unit	53.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00	300.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-				-	-	696.541.436.400,00	659.923.067.400,00	675.916.856.030,00	-39.891.436.400,00							656.650.000.000,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-				-	-	990.600.000,00	907.382.000,00	805.205.900,00	-185.394.100,00			-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		1.055.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	180.000.000,00	167.886.000,00	151.563.900,00	-28.436.100,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			190.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	300.600.000,00	300.600.000,00	253.952.000,00	-46.648.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			320.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	256.880.000,00	245.741.000,00	-54.259.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			320.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	132.201.000,00	112.632.000,00	-37.368.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			160.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	49.815.000,00	41.317.000,00	-18.683.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			65.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				-	-	534.000.000,00	506.774.000,00	412.065.000,00	-121.935.000,00			-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		568.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	174.000.000,00	170.064.000,00	130.269.000,00	-43.731.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			180.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																			
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				50 Laporan	50 Laporan	94.000.000,00	87.695.000,00	77.659.000,00	-16.341.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			98.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																			
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	12 Dokumen	96.000.000,00	85.443.000,00	64.645.000,00	-31.355.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			105.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																			
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	163.572.000,00	139.492.000,00	-30.508.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			185.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	-	497.775.000,00	394.470.000,00	287.848.530,00	-209.926.470,00			-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		527.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>				1355 Laporan	1355 Laporan	94.685.000,00	77.721.000,00	59.630.000,00	-35.055.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			97.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>				3 Laporan	3 Laporan	101.090.000,00	83.231.000,00	41.790.350,00	-59.299.650,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			105.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	130.000.000,00	108.788.000,00	85.500.000,00	-44.500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			140.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				53 Orang	53 Orang	160.000.000,00	112.730.000,00	91.185.000,00	-68.815.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			165.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina</i>				37 Lembaga	37 Lembaga	12.000.000,00	12.000.000,00	9.743.180,00	-2.256.820,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-				-	-	694.519.061.400,00	658.114.441.400,00	674.411.736.600,00	-20.107.324.800,00			-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		654.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>				449 Laporan	449 Laporan	675.559.217.400,00	639.154.597.400,00	655.451.892.600,00	-20.107.324.800,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			635.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			2.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				449 Laporan	449 Laporan	16.959.844.000,00	16.959.844.000,00	16.959.844.000,00	0,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			17.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-				-	-	1.122.424.000,00	1.081.711.000,00	884.293.090,00	170.576.000,00							1.293.000.000,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	1.122.424.000,00	1.081.711.000,00	884.293.090,00	-238.130.910,00			-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		1.293.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	85.000.000,00	84.120.000,00	-880.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			90.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	110.000.000,00	101.724.000,00	70.033.000,00	-39.967.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			110.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	110.492.000,00	106.880.000,00	79.102.000,00	-31.390.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			115.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	357.832.400,00	-42.167.600,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	137.938.000,00	116.925.690,00	-33.074.310,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	90.000.000,00	84.618.000,00	61.290.000,00	-28.710.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			95.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	2 Laporan	125.000.000,00	113.619.000,00	63.295.000,00	-61.705.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			130.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	51.932.000,00	51.932.000,00	51.695.000,00	-237.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			53.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-				-	-	5.689.515.000,00	5.569.382.000,00	5.340.829.960,00	-4.074.515.000,00							1.615.000.000,00		
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	5.689.515.000,00	5.569.382.000,00	5.340.829.960,00	-348.685.040,00			-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		1.615.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.051.882.000,00	-48.118.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			245.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				26 Laporan	26 Laporan	105.000.000,00	105.000.000,00	85.209.000,00	-19.791.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			105.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1363586 Laporan	1363586 Laporan	120.576.000,00	120.576.000,00	113.978.000,00	-6.598.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				80 Laporan	80 Laporan	120.000.000,00	100.016.000,00	86.650.360,00	-33.349.640,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			145.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1360897 Dokumen	1360897 Dokumen	383.939.000,00	383.939.000,00	380.759.000,00	-3.180.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		450.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1360897 Dokumen	1360897 Dokumen	3.860.000.000,00	3.759.851.000,00	3.622.351.600,00	-237.648.400,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			420.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	J U M L A H								731.002.175.335,00	688.091.279.480,00	703.661.982.467,00	-86.009.642.937,00							681.979.000.000,00	